BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Pelatihan staf pengadaan di LPMP dan P4TK Kemdikbud dalam hasil penelitian secara umum menggambarkan tingkat implementasi yang baik memenuhi kriteria dan ketentuan yang berlaku serta tujuan yang diharapkan. Pernyataan ini didasarkan pada hasil dari setiap dimensi yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan memperoleh nilai rata-rata termasuk dalam kategori tinggi. Dimensi perencanaan meliputi analisis kebutuhan pelatihan bagi staf pengadaan, dimensi pelaksanaan meliputi proses kegiatan pelatihan pengadaan barang/jasa, dan pelaporan merupakan bentuk pertanggungawaban kegiatan baik lisan ataupun tertulis dari staf yang mengikuti pelatihan kepada pimpinannya pasca pelatihan.
2. Kompensasi staf pengadaan di LPMP dan P4TK Kemdikbud dalam hasil penelitian ini secara umum telah diberikan sesuai ketentuan yang berlaku namun dirasakan masih belum makimal khususnya terkait dengan prinsip keadilan dengan beban pekerjaan dan sebagai suatu jabatan tugas profesional. Pernyataan ini didasarkan pada hasil dari setiap dimensi yang meliputi kompensasi finansial langsung, finansial tidak langsung dan non finansial memperoleh nilai rata-rata termasuk dalam kategori cukup. Dimensi finansial langsung dan tidak langsung mengarah kepada kompensasi yang berupa finansial dan fasilitasi kegiatan, sedangkan dimensi non finansial lebih mengarah kepada bentuk penghargaan, pengakuan dan perlindungan kerja.
3. Efektifitas pengadaan barang/jasa di LPMP dan P4TK Kemdikbud dalam hasil penelitian ini secara umum menggambarkan kondisi sangat baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tujuan yang diharapkan. Pernyataan ini didasarkan pada hasil dari setiap dimensi yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan memperoleh nilai rata-rata termasuk dalam kategori sangat tinggi. Dimensi perencanaan meliputi

ruang lingkup perencanaan pengadaan, dimensi pelaksanaan meliputi proses kegiatan impelemntasi pengadaan barang/jasa, dan pelaporan meliputi pembuatan dan mekanisme penyimpanan dokumen hasil kegiatan sebagai bentuk pertanggungawaban anggaran publik.

4. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pelatihan staf pengadaan terhadap efektifitas pengadaan barang/jasa di LPMP dan P4TK Kemdikbud. Namun berdasarkan hasil penelitian, menunjukan bahwa pengaruhnya termasuk dalam kategori rendah.
5. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kompensasi terhadap efektifitas pengadaan barang/jasa di LPMP dan P4TK Kemdikbud. berdasarkan hasil penelitian, pengaruhnya termasuk dalam kategori sedang dan berpengaruh positif.
6. Terdapat pengaruh antara pelatihan staf pengadaan dan kompensasi terhadap efektifitas pengadaan barang/jasa di LPMP dan P4TK Kemdikbud. berdasarkan hasil penelitian, pengaruhnya termasuk dalam kategori sedang dan berpengaruh positif.

B. Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh di lapangan, ada beberapa rekomendasi yang akan disampaikan dalam upaya kontribusi positif untuk perbaikan dan pengembangan keilmuan serta praktek terkait pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

1. Aspek Pelatihan

   Kegiatan pelatihan staf pengadaan yang terungkap dalam penelitian ini menggambarkan kondisi yang tinggi (baik), namun dalam aspek monitoring dan evaluasi (monev) dampak diklat, masih dalam kategori cukup. Kegiatan pelatihan yang efektif, seharusnya dirancang secara komprehensif dari mulai tahap analisis kebutuhan, proses pelatihan hingga pemantauan manfaat hasil pelatihan (dampak pelatihan) terhadap kinerja

Asep Hermawan, 2013
Pengaruh Pelatihan Staf Pengadaan Dan Kompensasi Terhadap Efektifitas Pengadaan Barang/Jasa Di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Dan Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Kementerian Pendididikan & Kebudayaan
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

organisasi. Untuk itu, Penulis menghimbau kepada para pihak terkait, khususnya instansi pengelola pelatihan dan LKPP untuk melakukan evaluasi, baik proses maupun kegiatan monitoring dan evaluasi pasca kegiatan pelatihan secara konsisten. Kegiatan tersebut untuk mengukur motivasi dan reaksi positif peserta pelatihan serta sebagai instrumen proses timbal balik (*feed back)* dan evaluasi dari kekurangan kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan, dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan pelatihan selanjutnya. Bagi instansi pengguna pelatihan, juga diharapkan melakukan analisis dalam proses seleksi calon peserta pelatihan sehingga peserta pelatihan merupakan peserta terbaik yang memiliki dasar motivasi belajar dan tujuan yang jelas dalam pelatihan.

2. Aspek Kompensasi

Dalam hasil penelitian ini menggambarkan bahwa aspek kompensasi staf pengadaan, baik yang bersifat kompensasi finansial langsung dan tidak langsung, maupun kompensasi non finansial menunjukan kondisi yang kurang maksimal yaitu dalam kategori cukup. Sehingga sangat wajar apabila dalam penelitian ini juga terungkap bahwa tugas menjadi pengelola pengadaan menjadi sebuah profesi yang tidak diminati dikalangan pegawai negeri sipil (PNS). Padahal, hampir semua pakar berpendapat bahwa salah satu faktor determinan yang mempengaruhi efektifitas kinerja pegawai adalah pemberian sistem kompensasi yang efektif dengan memenuhi prinsip keadilan. Berdasarkan temuan fakta diatas, penulis secara khusus memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

a) Bagi Pemangku Kebijakan

Para pemangku kebijakan baik ditatanan eksekutif maupun legislatif diharapkan dapat mengkaji kembali sistem kompensasi bagi pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang selama ini diterapkan. Prinsip keadilan dan tunjangan berdasarkan kinerja merupakan konsep dasar dalam merancang pemberian kompensasi yang efektif. Remunerasi

Asep Hermawan, 2013
Pengaruh Pelatihan Staf Pengadaan Dan Kompensasi Terhadap Efektifitas Pengadaan Barang/Jasa Di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Dan Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Kementerian Pendididikan & Kebudayaan
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

merupakan sistem kompensasi yang sangat ideal diterapkan dalam tatanan birokrasi pemerintah sebagai bagian dari peningkatan profesionalisme aparatur negara. Pelaksanaan remunerasi PNS diharapkan segera diimplementasikan pada semua Kementerian khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga dapat menjadi jembatan dalam peningkatan dan profesionalitas PNS khususnya para pengelola pengadaan pemerintah. Urgensi implementasi tersebut merujuk pada ketentuan yang berlaku dan dalam upaya pemenuhan hak PNS dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang mengamanatkan bahwa setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya.

Selain itu, untuk menjamin kepastian pengembangan profesi pengadaan, hendaknya pemerintah dan legislatif segera mengeluarkan regulasi yang secara teknis mengatur mekanisme jenjang karir bagi tenaga fungsional khusus pengadaan. Dengan demikian, diharapkan jabatan pengelola pengadaan dapat menjadi profesi yang strategis dan dapat diminati dikalangan PNS sehingga secara tidak langsung dapat berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa melalui pelayanan profesional terhadap masyarakat.

b) Bagi Instansi Pemerintah

Rendahnya kompensasi yang diterima oleh pengelola pengadaan, hendaknya disikapi oleh pimpinan instansi pemerintah sebagai suatu tantangan perubahan manajemen. Kekakuannya aspek kompensasi finansial yang diberikan kepada staf pengadaan seperti PNS lainnya yang telah diatur dalam peraturan keuangan negara, dapat disiasati dengan pemberian kompensasi non finansial yang efektif. Kompensasi tersebut meliputi pemberian fasilitas kerja yang memadai, proteksi dan penghargaan pekerjaan yang tinggi ataupun penilaian kinerja yang objektif

Asep Hermawan, 2013
Pengaruh Pelatihan Staf Pengadaan Dan Kompensasi Terhadap Efektifitas Pengadaan Barang/Jasa Di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Dan Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Kementerian Pendididikan & Kebudayaan
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

kedalam jenjang pengembangan karir para pengelola pengadaan. Upaya tersebut diatas diharapkan dapat berfungsi sebagai stimulus untuk meningkatkan motivasi dan kinerja pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah dalam mensiasati keterbatasan kompensasi finansial yang selama ini diterapkan.

3. Aspek Efektifitas Pengadaan Barang/Jasa

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang terungkap dari hasil penelitian menunjukan kategori sangat tinggi yang berarti menggambarkan kinerja yang sangat baik. Namun dalam indikator pelaporan sisa hasil anggaran yang berfungsi sebagai bahan revisi anggaran pada tahun berjalan, masih kurang optimal yang berada dalam kategori tinggi. Pelaporan merupakan komunikasi antara pengelola kegiatan kepada pimpinan selaku kuasa pengguna anggaran. Apabila komunikasi terkait hasil sisa anggaran kegiatan pengadaan berjalan dengan baik, maka revisi anggaran dapat direncanakan dan diimplementasikan untuk menutupi kegiatan lainnya yang belum terakomodir sebelumnya terkait keterbatasan anggaran. Sehingga saldo anggaran dapat terserap dengan baik kedalam kegiatan program yang lain berdasarkan skala prioritas, mengingat sistem anggaran dalam sistem pemerintah kita adalah keterserapan anggaran. Semakin tinggi keterserapan anggaran, menunjukan semakin efektif pula kinerja organisasi pemerintahannya.

Berdasarkan temuan diatas, penulis menghimbau kepada pengelola pengadaan supaya senantiasa meningkatkan kinerjanya terutama yang berkaitan dengan komunikasi kepada pimpinan selaku kuasa pengguna anggaran terkait sisa anggaran hasil pengadaan. Dengan demikian, pimpinan dapat melakukan perencanan revisi anggaran dengan tepat, berdasarkan analisis skala prioritas dalam upaya pencapaian tujuan organisasi yang efektif dan efisien.

4. Aspek pengembangan keilmuan

Asep Hermawan, 2013
Pengaruh Pelatihan Staf Pengadaan Dan Kompensasi Terhadap Efektifitas Pengadaan Barang/Jasa Di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Dan Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Kementerian Pendididikan & Kebudayaan
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Dalam tatanan empiris, banyak ditemukan fakta-fakta baru yang secara keilmuan dapat menjadi khasanah perbaikan dan pengembangan dari keilmuan yang telah ada. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan dinamika yang menjadi dasar dari berkembangnya ilmu pengetahuan sebelumnya. Begitu pula halnya dengan ruang lingkup pengadaan barang jasa sebagai ranah ilmu pengetahuan yang erat bersinggungan dengan ilmu lainnya, memerlukan pengembangan riset yang teritegrasi khususnya dengan teknologi informasi dalam upaya menciptakan pelayanan pengadaan publik yang transparan dan akuntabel memenuhi harapan masyarakat.

Begitu pula dengan tingginya tuntutan profesionalitas pengelola pengadaan dan sangat kompleksnya ruang lingkup keilmuan pengadaan pengadaan barang/jasa, sudah tidak ideal apabila hanya diakomodir melalui kegiatan pelatihan yang memiliki banyak keterbatasan terutama singkatnya alokasi waktu. Oleh karenanya, penulis membuka solusi wacana terhadap potensi pemenuhan kompetensi pengadaan barang/jasa melalui pembelajaran formal seperti profesi lainnya.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karenanya, diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang berminat dengan penelitian serupa dapat lebih menyempurnakan dari segala keterbatasan dalam penelitian ini guna pengembangan ilmu khususnya dalam lingkup pengadaan barang/jasa di lingkungan pendidikan.

Asep Hermawan, 2013
Pengaruh Pelatihan Staf Pengadaan Dan Kompensasi Terhadap Efektifitas Pengadaan Barang/Jasa Di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Dan Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Kementerian Pendididikan & Kebudayaan
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
PERPUSTAKAAN

Asep Hermawan, 2013
Pengaruh Pelatihan Staf Pengadaan Dan Kompensasi Terhadap Efektifitas Pengadaan Barang/Jasa Di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Dan Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Kementerian Pendididikan & Kebudayaan
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu